



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1/SE/I/2022

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, maka diperlukan adanya penyamaan persepsi dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang:

- a. PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai setelah penyetaraan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional;
- b. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Periode Januari s.d Juni 2021;
- c. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Periode Juli s.d Desember 2021; dan
- d. Penilaian kinerja PNS tahun 2021.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

4. Isi Surat Edaran

a. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS

- 1) Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendeklegasian kewenangan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
- 2) Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai Kinerja PNS.
- 3) Adapun rincian Jabatan PNS yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1	JPT Utama	Menteri yang mengoordinasikan	Menteri yang mengoordinasikan
2	JPT Madya di Lingkungan Kementerian	Menteri	Menteri
3	JPT Madya di Lingkungan Lembaga non-Kementerian	JPT Utama	JPT Utama
4	JPT Madya di Lingkungan Lembaga non-Struktural	Pimpinan Lembaga non-Struktural	Pimpinan Lembaga non-Struktural
5	JPT Madya di Lingkungan Lembaga Negara	Pimpinan Lembaga Negara	Pimpinan Lembaga Negara
6	JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Gubernur	Gubernur
7	JPT Pratama di Lingkungan Kementerian	JPT Madya	Menteri
8	JPT Pratama di Lingkungan Lembaga non-Kementerian	JPT Madya	JPT Utama
9	JPT Pratama di Lingkungan Lembaga non-Struktural	JPT Madya	JPT Madya
10	JPT Pratama di Lingkungan Lembaga Negara	JPT Madya	JPT Madya
11	JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota	Bupati/ Walikota

12	Administrator di Lingkungan Pemerintah Pusat	JPT Pratama	JPT Madya
13	Administrator di Lingkungan Instansi Daerah	JPT Pratama	Gubernur/ Bupati/ Walikota
14	Pengawas	Administrator	JPT Pratama
15	Pelaksana	Pengawas	Administrator
16	Fungsional Tingkat Ahli Utama	JPT Pratama/ JPT Madya	JPT Madya/JPT Utama
17	Fungsional Tingkat Ahli Utama di Lingkungan Instansi Daerah	JPT Pratama	JPT Madya/ Gubernur/ Bupati/ Walikota
18	Fungsional Tingkat Ahli Madya	JPT Pratama	JPT Pratama/ JPT Madya
19	Fungsional Tingkat Ahli Muda	Administrator/J PT Pratama	JPT Pratama/ JPT Madya
20	Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Pengawas/ Administrator/J PT Pratama	Administrator/J PT Pratama/ JPT Madya
21	Fungsional Tingkat Keterampilan	Pengawas/ Administrator/J PT Pratama	Administrator/J PT Pratama
22	Kepala Unit Kerja Mandiri	Administrator/J PT Pratama	JPT Pratama/ JPT Madya/ Kepala Daerah

- 4) Dalam melakukan penilaian kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat meminta bahan pertimbangan dari koordinator dan/atau sub-koordinator di lingkungan unit kerjanya.
 - 5) Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam melakukan penilaian kinerja PNS yang bekerja dalam suatu tim dapat meminta bahan pertimbangan dari ketua tim terkait.
- b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS
- 1) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) Periode yaitu:

- a) Periode I (Januari sampai dengan Juni Tahun 2021):

Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

- b) Periode II (Juli sampai dengan Desember Tahun 2021):

Tata cara penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian Kinerja PNS mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

- 2) Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;
- b) Melakukan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021; dan
- c) Menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen).

- 3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap PNS wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas:

- a) Dokumen Sasaran Kerja Pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kerja pegawai, dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;

- b) Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kinerja pegawai, dan dokumen penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021;
 - c) Dokumen Integrasi antara penilaian prestasi kerja bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dengan penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021; dan
 - d) Laporan Dokumen Kinerja Tahun 2021.
- 4) Contoh dokumen model dasar pada angka 3) huruf a) s.d. huruf d) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik

 BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan Yth:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1/SE/I/2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2021

Formulir Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021

SASARAN KERJA PEGAWAI

NO.	I. PEJABAT PENILAI	NO.	II. PNS YANG DINILAI			
1.	Nama	1.	Nama			
2.	NIP	2.	NIP			
3.	Pangkat/Gol.Ruang	3.	Pangkat/Gol.Ruang			
4.	Jabatan	4.	Jabatan			
5.	Unit Kerja	5.	Unit Kerja			
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
dst.						

Jakarta,

Pejabat Penilai,

PNS yang dinilai,

.....Nama.....

NIP.

.....Nama.....

NIP.

Atasan Pejabat Penilai,

.....Nama.....

NIP.

Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Jangka Waktu Penilaian ... Januari s.d. Juni 2021

NO.	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHI-TUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya (Rp)		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya (Rp)		
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.													
3.													
4.													
5.													
dst.													
	II.TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS												
	a. Tugas Tambahan *)												
	b. Kreativitas **)												
NILAI CAPAIAN SKP												***)	

.....,

Pejabat Penilai,

.....Nama.....

NIP.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN/LEMBAGA/ JANGKA WAKTU PENILAIAN
DAERAH PROV/KAB/KOTA BULAN... JANUARI s.d JUNI 2021

1.	YANG DINILAI	
a.	N a m a	
b.	N I P	
c.	Pangkat, golongan ruang	
d.	Jabatan / Pekerjaan	
e.	Unit Organisasi	
2.	PEJABAT PENILAI	
a.	N a m a	
b.	N I P	
c.	Pangkat, golongan ruang	
d.	Jabatan / Pekerjaan	
e.	Unit Organisasi	
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
a.	N a m a	
b.	N I P	
c.	Pangkat, golongan ruang	
d.	Jabatan / Pekerjaan	
e.	Unit Organisasi	

4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/ Nilai Prestasi Akademik*) x 60 %		
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan		
		2. Integritas		
		3. Komitmen		
		4. Disiplin		
		5. Kerjasama		
		6. Kepemimpinan		
		Jumlah**) x 40 %		
Nilai rata – rata ***)				
Nilai Perilaku Kerja****) x 40 %			
Nilai Prestasi Kerja		 (.....)	
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)				
Tanggal,				

SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

..... (NAMA INSTANSI)

**PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021**

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP (*opsional)	
PANGKAT/GOL RUANG		PANGKAT/GOL RUANG	
JABATAN		JABATAN	
INSTANSI		INSTANSI	
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Rencana Kinerja Utama 1 <i>(diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)</i>	IKI 1.1	Target 1.1
		IKI 1.2 <i>(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)</i>	Target 1.2 <i>(diisi dengan target yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)</i>
2	Rencana Kinerja Utama 2 <i>(diisi dengan rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)</i>	IKI 2.1	Target 2.1
		IKI 2.2 <i>(diisi dengan indikator kinerja rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)</i>	Target 2.2 <i>(diisi dengan target rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)</i>
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	Rencana Kinerja Tambahan 1 <i>(dapat ditambahkan pada tahun berjalan)</i>	IKI 1	Target 1

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

Pegawai yang Dinilai

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRtE

SKP PEJABAT ADMINISTRASI

..... (NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	NAMA	NIP	NIP	PANGKAT/GOL	PANGKAT/GOL
RUANG	RUANG	JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA	UNIT KERJA
NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1.	Rencana Kinerja Atasan Langsung yang diintervensi	Rencana Kinerja Utama 1 (<i>diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan</i>)	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.1	Target 1.1
			Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.2	Target 1.2
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.	-	Rencana Kinerja Tambahan1 (<i>diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan</i>)	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1	Target 1

Pegawai yang Dinilai

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



SKP PEJABAT FUNGSIONAL

..... (NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA		NAMA			
NIP		NIP			
PANGKAT/GOL RUANG		PANGKAT/GOL RUANG			
JABATAN		JABATAN			
UNIT KERJA		UNIT KERJA			
NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1.	Rencana Kinerja Atasan Langsung/Unit Kerja/ Organisasi yang diintervensi	Rencana Kinerja Utama 1 <i>(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan)</i>	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.1	Target 1.1
		Rencana Kinerja Utama 2 <i>(dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi/unit kerja yang sesuai dengan tugas pokok jabatan)</i>	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.2	Target 1.2
		Rencana Kinerja Utama 2 <i>(dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi/unit kerja yang sesuai dengan tugas pokok jabatan)</i>	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 2.1	Target 2.1
		Rencana Kinerja Utama 2 <i>(dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi/unit kerja yang sesuai dengan tugas pokok jabatan)</i>	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 2.2	Target 2.2
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.	-	Rencana Kinerja Tambah 1 <i>(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/penugasan diluar tugas pokok jabatan)</i>	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1	Target 1

Pegawai yang Dinilai

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

.....(NAMA INSTANSI)

TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	NAMA	NAMA	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI
NIP	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	TARGET	CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI
PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	REALISASI	CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI
JABATAN			(4)	(5)	(7)
RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	NO	TARGET	REALISASI	KATEGORI CAPAIAN IKI
(2)	(3)	(1)	(4)	(6)	(8)
A. KINERJA UTAMA					
B. KINERJA TAMBAHAN					
NILAI AKHIR SKP	KETERANGAN PEJABAT PENILAI				
	(Opsional)				

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE



PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

.....(NAMA INSTANSI)
TAHUN 2021

PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI				PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA		NAMA		REALISASI		CAPAIAN RENCANA KINERJA	
NIP	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	TARGET	KATEGORI IKI	CAPAIAN IKI	NILAI
UNIT KERJA	UNIT KERJA	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA INDIVIDU	ASPEK KINERJA INDIVIDU	KATEGORI IKI	CAPAIAN IKI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.KINERJA UTAMA							
B.KINERJA TAMBAHAN							
NILAI AKHIR SKP							
KETERANGAN ANPEJABAT PENILAI <i>(Opisional)</i>							

(tempat),
(tanggal, bulan,
tahun)Pejabat
Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan BSeE



PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

..... (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	NAMA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	REALISASI TARGET	CAPAIAN IKI
NIP	NIP				
PANGKAT/GOL RUANG					PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN					JABATAN
UNIT KERJA					UNIT KERJA
					CAPAIAN RENCANA KINERJA
RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA / ORGANISASI NO	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	REALISASI TARGET	KATEGORI CAPAIAN IKI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
B. KINERJA TAMBAHAN					
NILAI AKHIR SKP					
KETERANGAN ANPEJABAT PENILAI <i>(Opsional)</i>					

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE



PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL PENILAIAN			
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	SEBUTAN
A. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)			
B. PERILAKU KERJA PEGAWAI			
1. Orientasi Pelayanan			
2. Inisiatif Kerja			
3. Komitmen			
4. Kerjasama			
5. Kepemimpinan			
NILAI KINERJA PNS			-
C. IDE BARU			-
NILAI AKHIR			-

PNS YANG DINILAI

(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN			
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
JANUARI - JUNI			
JULI - DESEMBER			
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021			
PREDIKAT			

PEGAWAI YANG DINILAI

(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

1	PEGAWAI YANG DINILAI
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL RUANG	:
JABATAN	:
UNIT KERJA	:
2	PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL RUANG	:
JABATAN	:
UNIT KERJA	:
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL RUANG	:
JABATAN	:
UNIT KERJA	:
4	PENILAIAN KINERJA
NILAI SKP	:
NILAI PERILAKU KERJA	:
NILAI SKP + PERILAKU KERJA	:
IDE BARU	:
NILAI KINERJA PEGAWAI	:
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:
TOTAL ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH (BAGI PEJABAT FUNGSIONAL)	:
5	PERMASALAHAN
6	REKOMENDASI
7	KEBERATAN
8	PENJELASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
9	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
10. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Pegawai yang Dinilai,	
(Nama) (NIP)	
11. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Pejabat Penilai Kinerja,	
(Nama) (NIP)	
12. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Atasan Pejabat Penilai Kinerja,	
(Nama) (NIP)	

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik

BIMA HARIA WIBISANA

